



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 18 /KPTS/ I /2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN DRIVER KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Driver kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dalam mendukung aktivitas para Pejabat pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Driver kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Driver Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



Handwritten signature or mark in blue ink.

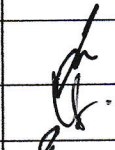



11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/019/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Permohonan Penerbitan SK Tambahan Penghasilan PNS/Non PNS Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Driver Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Driver sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan atas pelaksanaan tugasnya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2018

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 18 /KPTS/ I /2018
 TANGGAL 2 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR NAMA DRIVER KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
 DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB.
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	UNIT PEMAKAI KENDARAAN	NO POLISI DG-HB	BESAR HONORARIUM/ BULAN (RP)
1	2	3	4	5
1	WELLY LIOT	RT. BUPATI	8001	1.000.000
2	PILING	RT. WAKIL BUPATI	1010	1.000.000
3	HUSEN SALASA	RT. WAKIL BUPATI	1014	1.000.000
4	WIN TEMPE	RT. SEKDA	1020	1.000.000
5	MABUD MALIK	ASS. I	1086	1.000.000
6	BERNY JURIAN LEFO	ASS II	1038	1.000.000
7	JEMY LATUKOLAN	STAF AHLI	1008	1.000.000
8	ANDRY YAMIN	STAF AHLI	1065	1.000.000
9	FANDY BARUTI	STAF AHLI	1011	1.000.000
10	SULAIMAN RIFAI	PEMERINTAHAN	1025	1.000.000
11	ISKANDAR ZULKARNAIN	HUKUM	1075	1.000.000
12	MOSES A. BAWELE	ULP	1121	1.000.000
13	ABDUL HARIS PELLU	OPERASIONAL UMUM	8003	1.000.000
14	AMIRUDIN USMAN	BUS PEMDA	1023	1.000.000
15	ANDARIAS PASUMA	OPERASIONAL UMUM	1029	1.000.000
16	RATNO B. MANOARFA	OPERASIONAL UMUM	29	1.000.000
17	M. SABRY PAPULING	OPERASIONAL UMUM	1104	1.000.000
18	RIZAL AYUB	OPERASIONAL UMUM	1032	1.000.000
19	IDRATNO FARA	OPERASIONAL UMUM	1021	1.000.000
20	HIDAYAT HABSBY	OPERASIONAL UMUM	7000	1.000.000
21	FUAT HI. SURATIN	OPERASIONAL UMUM	1021	1.000.000
22	RIDWAN SILITUBUN	OPERASIONAL UMUM	1029	1.000.000
23	KORES HULI	OPERASIONAL UMUM	1054	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

